

LITERATURE REVIEW: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUMPUKAN PENYERAPAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN

Wiwi Prapti Wulandari^{1*}, Cris Kuntadi², R. Luki Karunia³

¹ Politeknik STIA LAN Jakarta, e-mail: wiwi.wulandari@yahoo.co.id

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Politeknik STIA LAN Jakarta, e-mail: luki@stialan.ac.id

*Corresponding Author : *Wiwi Prapti Wulandari*

Abstrak: Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab penumpukan penyerapan anggaran di instansi pemerintah pada akhir tahun dalam konteks manajemen anggaran sektor publik.

Metodologi Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis artikel-artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber teoritis terkait manajemen anggaran, penyerapan anggaran, kebijakan anggaran, perencanaan anggaran, dan manajemen proyek.

Temuan – Regulasi dan kebijakan, perencanaan anggaran, dan manajemen proyek memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Batasan Penelitian – Penelitian ini terbatas pada tinjauan literatur, sehingga tidak mencakup penelitian empiris atau analisis data primer, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan konseptual.

Implikasi – Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada penyerapan anggaran yang buruk, sehingga dapat membantu pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan pengambil keputusan, dalam meningkatkan manajemen anggaran, kebijakan anggaran, perencanaan anggaran, dan manajemen proyek.

Keaslian – Meskipun penelitian ini berdasarkan pada tinjauan literatur, pendekatan komprehensif dan analisis faktor-faktor yang berkontribusi pada penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun serta implikasinya adalah kontribusi asli dalam pemahaman masalah ini. Serta menyajikan dalam konteks penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Keyword: Penumpukan Penyerapan Anggaran, Kebijakan Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Manajemen Proyek.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator yang dirasa penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah atau instansi, karena dengan pengukuran penyerapan anggaran dapat melihat dan menentukan kinerja serta kemampuan suatu organisasi baik pemerintahan ataupun swasta untuk menjalankan dan mempertanggung-jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan (Fajar & Arfan, 2017). Penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh manajemen anggaran atau dikenal dengan istilah *Public Financial Management* (PFM). Bastian, (2021, p. 3) menjelaskan bahwa Manajemen anggaran yang efektif merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun fiskal menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Salamah, 2018; Suwarni & Muhammad, 2018).

Penyerapan anggaran yang terkesan dilaksanakan terpusat pada akhir tahun anggaran dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, pemilihan program yang tidak efisien, dan pelaksanaan proyek-proyek yang kurang matang. Hal ini dapat merugikan efisiensi penggunaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang direncanakan. Proyek-proyek yang kurang matang merupakan sumber potensi kerugian yang signifikan dalam konteks penggunaan anggaran sektor publik dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ketika sebuah proyek dianggap "kurang matang," hal ini mengindikasikan bahwa proyek tersebut belum terencana, dikembangkan, atau dievaluasi dengan baik sebelum dimulai atau selama pelaksanaannya.

Penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun fiskal merupakan masalah yang sering dialami dan dapat disebut sebagai permasalahan klasik. Bahkan permasalahan ini telah menjadi permasalahan yang persisten di banyak negara (Rakhman, 2019). Fenomena ini sering disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyerapan anggaran (Dahana & Ermawati, 2020). Faktor internal yang berkontribusi pada penumpukan penyerapan anggaran dapat meliputi peraturan internal, kebijakan organisasi, atau prosedur administratif yang menekankan penyerapan anggaran pada akhir tahun sebagai tujuan utama. Terkadang, ada tekanan internal di dalam instansi pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran mereka terpakai sepenuhnya pada akhir tahun fiskal guna menghindari pemotongan anggaran di tahun berikutnya. Ini bisa mendorong praktik penyerapan anggaran yang tidak efisien dan mengabaikan kebijakan anggaran yang lebih bijaksana.

Di samping faktor internal, faktor eksternal juga turut berperan dalam penumpukan penyerapan anggaran. Perubahan dalam peraturan, regulasi, atau kebijakan nasional yang mempengaruhi alokasi dan penyerapan anggaran dapat menjadi pemicu penyerapan yang tergesa-gesa. Misalnya, perubahan dalam hukum anggaran atau kebijakan fiskal dapat memaksa instansi pemerintah untuk menyesuaikan praktik penyerapan anggaran mereka.

Selain itu, tekanan dari pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga audit atau parlemen juga dapat memengaruhi praktik penyerapan anggaran di instansi pemerintah. Pemangku kepentingan eksternal ini sering kali menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, yang dapat mempengaruhi cara instansi pemerintah mengelola anggaran mereka, terutama menjelang akhir tahun fiskal. Dalam keseluruhan, penumpukan penyerapan anggaran adalah masalah yang kompleks dan multifaktorial, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Ketersediaan anggaran yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik, maka tidak mustahil terjadi pemborosan, ketidaksesuaian belanja dengan rencana, dan penyelewengan dana. Sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik bisa saja terbuang percuma. Jika lembaga pemerintah atau organisasi sektor publik tidak memiliki perencanaan anggaran yang matang atau sistem pengelolaan keuangan yang efektif, maka mereka mungkin cenderung menghabiskan anggaran secara impulsif atau tidak sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Ini dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak efektif dan ketidaksesuaian dengan program-program yang seharusnya menjadi fokus utama.

Selain pemborosan dan ketidaksesuaian belanja, ketersediaan anggaran yang melimpah juga meningkatkan risiko penyelewengan anggaran atau tindakan korupsi. Semakin banyak anggaran yang tersedia, semakin besar peluang bagi pihak-pihak yang tidak jujur untuk mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang memadai, risiko penyelewengan anggaran dapat meningkat secara signifikan.

Dalam rangka mengelola ketersediaan anggaran yang melimpah dengan baik, organisasi sektor publik perlu memiliki perencanaan anggaran yang matang, prosedur pengelolaan keuangan yang efisien, dan pengawasan yang ketat. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan juga sangat penting untuk mencegah pemborosan, ketidaksesuaian belanja, dan penyelewengan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan ketersediaan anggaran yang melimpah haruslah menjadi prioritas dalam upaya menjaga integritas dan efisiensi penggunaan anggaran sektor publik.

Rendahnya penyerapan anggaran menjadi perhatian serius pemerintah karena telah berdampak kepada perlambatan perekonomian nasional (Salamah, 2018). Untuk itu perencanaan yang baik, kesesuaian belanja dengan rencana, pengawasan dan pertanggung jawaban perlu di manajemen dengan baik. Dalam konteks yang semakin kompleks dan berubah-ubah dari manajemen anggaran sektor publik, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah dan instansi sektor publik lainnya dalam memperbaiki manajemen anggaran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran di instansi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan manajemen anggaran sektor publik.

Mengacu dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, penelitian ini mengambil tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi dan kebijakan terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh siklus perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen proyek terhadap penyerapan anggaran.

Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang dari pengambilan judul penulisan ini, beberapa masalah akan dirinci untuk membentuk dasar hipotesis yang dapat digunakan dalam penelitian berikutnya, sebagai berikut:

1. Apakah regulasi dan kebijakan anggaran berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun ?
2. Apakah siklus perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun ?
3. Apakah manajemen proyek berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun ?

Kajian Teori

Regulasi dan Kebijakan Anggaran

Regulasi dan kebijakan anggaran merupakan aspek kunci dalam manajemen anggaran sektor publik (Gruber, 2005; Robinson, 1998). Regulasi dan Kebijakan anggaran merujuk pada peraturan, pedoman, dan kebijakan yang mengatur bagaimana anggaran pemerintah atau organisasi sektor publik harus disusun, diajukan, disetujui, dan digunakan. Regulasi dan kebijakan anggaran berperan penting dalam mengarahkan pengelolaan anggaran, menjaga transparansi, serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2021, p.3).

Regulasi yang mengharuskan penyerapan anggaran pada akhir tahun atau kebijakan yang mendorong pemenuhan target anggaran dapat menjadi faktor pemicu penumpukan. Regulasi dan kebijakan anggaran memainkan peran penting dalam mengendalikan pengeluaran pemerintah (Halim, 2017). Regulasi menetapkan batasan dan aturan yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana publik. Ini membantu mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan prioritas.

Regulasi dan kebijakan anggaran menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memahami bagaimana anggaran publik digunakan dan memantau kinerja pemerintah. Oleh Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa regulasi dan kebijakan anggaran terkait transparan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Regulasi dan Kebijakan anggaran juga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan prioritas penggunaan dana, membantu mengalokasikan sumber daya ke program-program dan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Perencanaan Anggaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan definisi perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat atau sesuai, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya.

Perencanaan sendiri menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013), yaitu hal mendasar yang digunakan sebagai acuan bagi pembuatan anggaran adalah proses penyusunan rencana pendapatan, pembiayaan dan belanja dalam suatu waktu tertentu yang sudah terukur masanya. Konsep perencanaan dalam penggunaan anggaran yang tidak dibuat dengan baik dan rill akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan pada saat membuat arah untuk penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan dalam satu periode tertentu haruslah disusun dengan matang karena hal ini merupakan proses awal dan akan sangat menentukan keberhasilan dari proses setelahnya. Sistem ini harus tersusun dengan tatanan yang logis, sistematis dan baku yang didalamnya meliputi tata kerja, prosedur kerja hingga pedoman kerja dalam proses penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Jadi, proses pembuatan anggaran yang baik dan berkualitas akan menjadi kunci dari keberhasilan dan akuntabilitas program kerja yang disusun. Perencanaan dalam penyiapan anggaran akan menjadi dasar yang sangat penting karena hal ini akan menjelaskan dengan rinci apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi dimasa mendatang. Setiap organisasi harus memiliki pemikiran strategis sebagai proses struktur manajemen berfikir tentang tujuan organisasi yang berorientasi pada masa mendatang serta memikirkan bagaimana mengintegrasikan aktivitas yang ada di dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang mendorong sebuah organisasi harus memikirkan dan menyusun strategi antara lain: dinamika lingkungan pasar, perkembangan teknologi dan ekonomi eksternal. Pemikiran strategis ini kelak akan direalisasi dalam berbagai perencanaan serta harus mampu masuk dalam proses integrasi secara keseluruhan, kemudian didukung oleh prosedur penganggaran organisasi (Biduri, 2018).

Perumusan tujuan yang tidak berorientasi pada visi misi organisasi akan menjadi masalah bagi seorang perencana karena akan menyebabkan tujuan tersebut menjadi kurang tepat yang bisa menyebabkan tujuan-tujuan tersebut menjadi kurang tegas dan jelas karena tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain (Zulaikah & Burhany, 2019).

Manajemen Proyek

Manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari seni memimpin organisasi yang memiliki susunan kegiatan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, sampai pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

efektif dan efisien. Dalam suatu proyek, yang perlu dipertimbangkan bagaimana output proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan (Siswanto & Salim, 2019, p.4).

Sedangkan menurut Susanti, & Runiawati, (2015, p.3), manajemen proyek dapat juga diartikan sebagai pengelolaan proyek. Jika dilihat dari sektor publik, manajemen publik bisa diartikan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan atau program yang didukung oleh publik. Ada beberapa hal yang dapat dikelola dalam sektor publik ini, salah satunya adalah pengelolaan proyek yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ada dalam rencana kerja yang sudah ditetapkan. Manajemen proyek yang kurang matang adalah permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan proyek-proyek di berbagai sektor, termasuk sektor publik. Ini merujuk pada kurangnya kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien sepanjang tahun anggaran atau masa pelaksanaan proyek. Masalah ini dapat muncul dalam konteks pemerintahan dan organisasi lainnya.

Manajemen proyek yang kurang matang dapat mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan. Proyek yang terlambat dimulai atau yang tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan dapat menyebabkan penyerapan anggaran yang kurang efektif, karena alokasi anggaran mungkin tidak dapat digunakan sesuai dengan rencana awal. Ketika proyek-proyek tidak dilaksanakan dengan baik sepanjang tahun, instansi pemerintah atau organisasi mungkin terpaksa mempercepat penggunaan anggaran mereka menjelang akhir tahun anggaran untuk memenuhi target penyerapan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efisien.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mencari solusi dan strategi yang telah diusulkan dalam literatur untuk mengatasi masalah penumpukan penyerapan anggaran di instansi pemerintah. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang cara memperbaiki manajemen anggaran sektor publik dan menghindari pemborosan dana publik yang tidak perlu.

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Zulaikah & Burhany, (2019)	faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penumpukan penyerapan anggaran	Faktor perencanaan berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran	Kebijakan Anggaran, dan Manajemen proyek berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran
2	Sanjaya, (2018)	Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran, Politik anggaran berpengaruh signifikan	Regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran	Kebijakan Anggaran, dan Manajemen proyek berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran

		positif terhadap penyerapan anggaran, dan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran		
3	Kuntadi & Nugroho, (2023)	Perencanaan anggaran, Partisipasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran	Faktor Perencanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran	Regulasi dan Manajemen proyek berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
4	Diko, Hiola & Radjak, (2023)	Fakta yang ada dilapangan menjelaskan bahwa pada pelaksanaan anggaran untuk konstruksi ada beberapa yang masih perlu ditinjau kembali dikarenakan ada ketidaksesuaian yang ada di dokumen anggaran dan faktor Pengadaan barang/jasa yang ada dilapangan	Faktor Perencanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran	Kebijakan pelaksanaan dan faktor sumber daya manusia terhadap penumpukan penyerapan anggaran
5	Gagola, Sondakh, & Warongan, (2017)	Secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran	Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penyerapan anggaran	Kebijakan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
6	Kuntadi & Rosdiana, (2022)	Perencanaan anggaran, peraturan dan koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.	Perencanaan anggaran & peraturan berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran	Manajemen proyek berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
7	Ani, Mulyadi,	Kompetensi sumberdaya manusia, proses	Perencanaan anggaran	Regulasi dan Manajemen proyek berpengaruh

& Pratowo, (2020)	pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Depok. Perencanaan anggaran yang merupakan variabel moderating dapat memperkuat hubungan antara kompetensi sumberdaya manusia terhadap penyerapan anggaran, namun perencanaan anggaran tidak memperkuat hubungan antara proses pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran di Kota Depok.	berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran	terhadap penyerapan anggaran
-------------------------	---	--	------------------------------

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode kualitatif dan kajian kepustakaan (library research), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, dengan membaca, mencatat dan mengolah objek yang diteliti (Zed, 2023). Teori, dampak, dan korelasi antar variabel dianalisis melalui referensi dari buku-buku dan jurnal yang ditemukan baik secara konvensional di perpustakaan maupun secara digital melalui sumber-sumber online seperti Mendeley, Google Scholar, dan platform online lainnya. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari dasar untuk memperoleh dan membentuk landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan hipotesis penelitian (Kartiningrum, 2015).

Dalam penelitian, studi pustaka ada empat ciri utama yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penulis berhadapan dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan narasumber di lapangan.
2. Data pustaka berasal dari sumber data yang ada di perpustakaan dan siap digunakan.
3. Pada umumnya data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya bukan data asli di dapatkan dari lapangan secara langsung.
4. Data yang digunakan pada studi kepustakaan ini bersifat fleksibel dan tidak terbatas (Zed, 2023).

Dalam penelitian kualitatif, Kajian pustaka harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan asumsi-asumsi metodologis. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan pendekatan induktif agar penelitian ini tidak mempengaruhi arah pertanyaan peneliti. Hal ini disebabkan salah satu

tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah menjalankannya secara eksploratif (Ali & Limakrisna,2013).

Hasil dan Pembahasan

Dengan merujuk kepada kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan, artikel tinjauan literatur ini fokus pada diskusi mengenai penyerapan anggaran yang cenderung terpusat pada akhir tahun.

1. Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Anggaran terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran di Akhir Tahun

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran dikaitkan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan Negara (Mardiasmo, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarni (2018) menemukan bahwa Regulasi dan Kebijakan Anggaran menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja hingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Faktor regulasi yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran adalah pada konteks pemahaman dan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang ada. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan Sanjaya (2018) kepatuhan tersebut berupa adaptasi dengan aturan-aturan yang akan dijalankan.

Untuk mengurangi penumpukan penyerapan anggaran dengan memperhatikan Regulasi dan Kebijakan Anggaran, hasil penelitian yang dilakukan Ramdhani & Anisa (2017) salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menghentikan program-program yang tidak efektif, dan membuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif. Selain itu bisa juga dengan cara menerapkan regulasi untuk menyusun Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang dibuat berdasarkan prestasi kerja, dengan tujuan memperoleh manfaat yang lebih besar dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia (Manoppo & Walandouw, 2019).

2. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Regulasi dan Penumpukan Penyerapan Anggaran di Akhir Tahun

Jika merujuk kepada penelitian Mulyatini, Herlina, & Mardiana, (2018) , perencanaan anggaran adalah sebuah penegasan tentang estimasi kinerja yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu yang dijelaskan dalam ukuran yang jelas dalam bentuk finansial (Mardiasmo, 2009). Kuntadi & Nugroho (2023), menyebutkan bahwa untuk memastikan penyerapan anggaran yang efisien dan akurat, rencana anggaran maka harus disusun sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran perlu disusun dengan memperhatikan beberapa persyaratan diantaranya: kebutuhan organisasi, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan kesesuaian dengan aturan (Malahayati dalam Ferdinan, 2020).

Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdinan et al., (2020), hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) maka didapat hasil tingkat signifikansi = $0,000 < 0,05$ dan thitung $4,792 > t_{tabel} 2,001$, artinya bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga disimpulkan secara parsial perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini

kemudian di uji kembali oleh Kuntadi & Nugroho (2023), diperoleh hasil yang sama bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi daya serap anggaran.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Negara, Handajani, & Effendy (2018), dengan memperhatikan perencanaan anggaran, maka yang harus dilakukan adalah membenahi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, dengan mengidentifikasi dan melakukan akselerasi terhadap kegiatan yang bisa segera dilakukan, hal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional sesuai target, rencana kegiatan, serta rencana penarikan yang telah dibuat sehingga tidak penarikan tersebut tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Sementara hasil temuan lain yang dilakukan oleh Adinata, Adam, & Puspita (2023) tentang akselerasi penyerapan anggaran, penyerapan anggaran ditingkatkan dengan cara menentukan kelompok yang menjadi fokus. Ini dilakukan dengan memilih cluster prioritas dan cluster pembinaan satuan kerja (satker) yang akan menerima perhatian khusus dalam upaya untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin dalam tahun ini.

3. Pengaruh Manajemen Proyek terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran

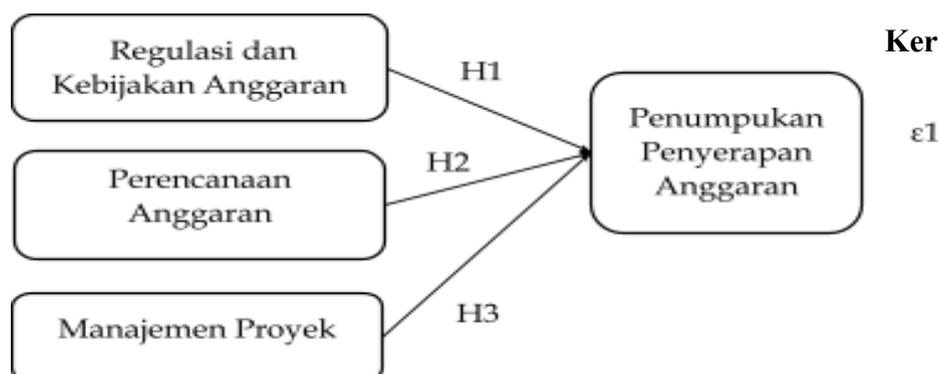
Manajemen proyek yang efektif melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dengan cermat. Ketika proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran, ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, karena jika tidak, maka proyek akan terhambat dan terjadi laju penyerapan anggaran yang rendah (Sari, Hendriyani, & Widyaningrum, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suniarta, Muka, & Widnyana (2023), manajemen proyek pada pengendalian waktu pelaksanaan dalam proses pembayaran juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, karena semakin lama memproses pembayaran dilakukan maka akan semakin jauh selisih antara prestasi pembayaran dengan prestasi fisik yang telah dicapai, dan hal itu bisa diartikan dengan semakin kurang pula kemampuan dalam melakukan penyerapan anggaran yang bisa mengakibatkan terjadinya penumpukan penyerapan anggaran.

Untuk mengurangi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun dengan memperhatikan manajemen proyek, maka yang harus dilakukan adalah dengan membuat perencanaan kas. Perencanaan Kas ini harus dapat disusun dengan baik, sebab hal ini akan memastikan ketersediaan dana yang bisa digunakan pada program atau proyek dan kegiatan yang akan berjalan. Perencanaan kas ini bisa mencegah terhambatnya pelaksanaan program atau proyek dan kegiatan yang disebabkan oleh ketidaktersediaan dana kegiatan. Disamping itu adanya perencanaan Kas yang baik bisa memberikan dampak positif pada penyerapan anggaran yang proporsional (Deslina, 2022)

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Jika dilihat dari kerangka konsep yang dijelaskan pada gambar diatas, regulasi dan kebijakan anggaran, perencanaan anggaran serta manajemen proyek terlihat memberikan pengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Selain variabel-variabel tersebut, beberapa hal yang juga memengaruhi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan anggaran: (Ferdinan, Isnurhadi, Widiyanti, & Adam, 2020), (Ratag, Kumenaung & Engka, 2019), (Frankoe, Kamaludin, & Fadli, 2021)
2. Sumber daya manusia: (Zulaikah & Burhany, 2019), (Sudarwati, Karamoy. & Pontoh, 2017), (Harahap, Taufik, & Nurazlina, 2020)
3. Pengadaan barang/jasa: (Ulfa, Bukit, & Yahya, 2017), (Sudarwati, Karamoy. & Pontoh, 2017), (Sukadi & Badriawan, 2012)
4. Dokumen administrasi: (Priyantono, Baga, & Falatehan, 2017), (Yanuriza, Hasan (Yanuriza, Hasan, & Rasuli, 2019), (Tofani, Hasan, & Nasrizal, 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Regulasi dan kebijakan anggaran berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun
2. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir Tahun
3. Manajemen proyek berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Kami terutama berterima kasih kepada Politeknik STIA LAN Jakarta yang memungkinkan kami untuk melakukan penelitian ini, rekan penelitian atas dukungan dan kolaborasi yang berharga dalam pelaksanaan penelitian ini, dan keluarga dan teman atas dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian ini.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan terkait dengan penelitian ini. Peneliti tidak menerima dukungan finansial tambahan dan tidak adanya hubungan atau aktivitas finansial atau non-finansial lain yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Referensi

- Adinata, W., Adam, B., & Puspita, I. (2023). Segmentasi Satuan Kerja dalam Rangka Akselerasi Penyerapan Anggaran dan Mendorong Ekonomi Regional. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 73–93. <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/487>
- Ani, L., Mulyadi, J. M. V, & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jeko.v5i1.1638>
- Bastian, I. (2021). *Filosofi Manajemen Keuangan Publik* (L. Mayasari & J. Deviyanti (eds.); 1st ed.). ANDI Yogyakarta. https://books.google.co.id/books?id=8T5DEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. In S. B. Sartika (Ed.), *Umsida Press* (1st ed.). UMSIDA PRESS. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-602-5914-20-1>
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. *Public Money & Management*, 41(2), 107–117. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1724665>
- Dahana, M. A., & Ermawati, E. (2020). *Analysis of The Budget Planning Process and Budget Execution Process*. 5(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.426>
- Deslina, D. (2022). *Peningkatan Kualitas Perencanaan Dalam Rangka Optimalisasi Penyerapan Anggaran*. Data Dan Publikasi Kemenku. Manajemen proyek pada pengendalian waktu pelaksanaan dalam proses pembayaran juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan
- Fajar, N., & Arfan, M. (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 95–102. <https://jurnal.usk.ac.id/TRA/article/view/14013>
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(1).
- Gruber, J. (2005). *Public finance and public policy*. Macmillan.
- Halim, A. (2017). *Manajemen keuangan sektor publik: problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah)* (2nd ed.). https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=599&keywords=
- Kuntadi, C., & Nugroho, D. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 332–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v4i3>

- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>
- Manoppo, E. S., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Rka-Skpd) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25432>
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (V. Napitupulu (ed.); terbaru). Penerbit ANDI.
- Mulyatini, N., Herlina, E., & Mardiana, D. (2018). Penerapan Tahapan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi. 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v5i2.1765>
- Negara, P. K., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi/Journal of Accounting and Investment*, 19(1), 76–91. <https://doi.org/10.18196/jai.190193>
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2). <https://doi.org/doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1).
- Robinson, M. (1998). Accrual accounting and the efficiency of the core public sector. *Financial Accountability & Management*, 14(1), 21–37.
- Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 45–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21927>
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(3). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3804>
- Sari, H. M., Hendriyani, I., & Widyaningrum, A. E. (2021). Earned Value Analysis pada Proyek Pembangunan Gedung Arsip Kantor BPN: Earned Value Analysis of BPN Office Archives Building Projects. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil TRANSUKMA*, 3(2), 154–167.
- Siswanto, A. B., & Salim, M. A. (2019). *Manajemen Proyek* (H. Ibda (ed.); 1st ed.). CV. Pilar Nusantara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UXYqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Manajemen+Proyek&ots=sXzUlvyvvgE&sig=uNbQxYBF4U29sxbxZ01XgqIrZew&redir_esc=y#v=onepage&q=Manajemen+Proyek&f=false
- Suniarta, I. B. K. S., Muka, I. W., & Widnyana, I. N. S. (2023). Analisis Keterlambatan Sistem Manajemen Pembayaran Termin dari Pemilik Proyek Kepada Kontraktor. *Widya Teknik*,

19(1), 23–29. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/WidyaTeknik/article/view/4146>

- Susanti, E., & Runiawati, N. (2015). Pengertian Manajemen Proyek Sektor Publik. In *Pustaka. Ut. Ac. Id(pp. 1–73)*. [https://pustaka. ut. ac. id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/ADPU433803-M1. pdf](https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/ADPU433803-M1.pdf) (p. 73).
- Suwarni, D. E., & Farid Maruf, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v6n5.p%25p>
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221–1234.